

Judul : Siskamling & Pos Ronda bisakah diaktifkan kembali?
Tanggal : Jumat, 12 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Siskamling & Pos Ronda Bisakah Diaktifkan Kembali?

Arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, agar sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan pos ronda di tingkat RT/RW diaktifkan kembali menjadi perbincangan. Pasalnya, sudah banyak wilayah yang tidak menerapkan Siskamling dan pos ronda.

Sebelumnya, Mendagri diberitakan, menerbitkan surat edaran (SE) yang isinya memerintahkan pengaktifan Siskamling dan pos ronda tingkat RT/RW. Tito juga meminta jajaran pejabat eselon I Kemendagri memantau pelaksanaan siskamling di berbagai daerah.

Perintah Mendagri itu tertuang dalam SE Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025, tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumilmas) yang kondusif di daerah. SE Mendagri memuat tiga hal pokok. Pertama, meningkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Kedua, peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda. Ketiga, mekanisme

pelaporan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas).

"Sesuai arahan Mendagri pelaksanaan SE ini harus diterapkan dengan mengedepankan peran serta dan partisipasi masyarakat secara luas, wadahnya adalah Satlinmas dan instrumennya adalah siskamling," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Saifrizal Zakaria Ali.

Siskamling di masa lalu, lekat dengan peran masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kemendagri meminta para kepala daerah menindaklanjuti surat itu.

"Karena stabilitas dan suasana kondusif daerah, merupakan fondasi bagi stabilitas dan kondisi nasional," ujarnya.

Arahan Mendagri ini pun mendapat respons dari para anggota Komisi II DPR yang merupakan mitra dari Kemendagri. Misalnya saja dari Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin. Dia mendukung arahan dari Kemendagri tersebut. Zulfikar mengatakan, arahan itu harus diwujudkan agar keadaan di lingkungan masyarakat aman dan tentram.

"Ini harus didukung dan dilaksanakan," singkatnya, Kamis (11/9/2025).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Menurut dia, Siskamling merupakan ide yang bagus. Meskipun begitu, dia memberikan catatan, agar Siskamling harus menjadi gerakan.

"Sebab Siskamling akan sulit kalau dipaksakan dari atas," tegas Mardani kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (11/9/2025).

Oleh karena itu, lanjut Mardani, Kemendagri sebaiknya berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, melibatkan RT dan RW. Apalagi, di perumahan yang tertutup dan sudah bayar dengan satpam, tentu berbeda dengan kondisi lainnya.

"Jadi jangan Kemendagri langsung turun ke daerah, biarkan Pemda dengan perangkatnya agar Siskamling berjalan dengan baik," ujar Mardani.

Untuk mengetahui lebih lengkap pandangan dari Zulfikar Arse Sadikin dan Mardani Ali Sera mengenai arahan Pemerintah agar RT/RW mengaktifkan kembali Siskamling dan pos ronda, berikut wawancaranya.

ZULFIKAR ARSE SADIKIN

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar

Ketertiban & Keamanan
Tanggung Jawab Bersama



Pengaktifan Siskamling ini harus melibatkan partisipasi semua pihak, baik Pemerintah, aparat, maupun warga.

Apa pandangan Anda terkait arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar RT/RT mengaktifkan kembali Siskamling dan pos ronda?

Kami mendukung arahan Pemerintah agar Siskamling dan pos ronda tingkat RT/RW diaktifkan ya. Menurut saya, arahan dari Pemerintah kepada RT/RW itu harus diwujudkan ya.

Di era sekarang ini, apa ini akan efektif?

Tentu dengan adanya Siskamling supaya keadaan di lingkungan masyarakat aman dan tentram.

Jadi Anda mendukungnya ya? Iya, ini bagus, perlu kami dukung dan harus dilaksanakan segera.

Untuk teknisnya, siapa nanti yang akan melaksanakannya?

Pastinya, untuk mewujudkan keadaan aman, tentram, dan serbi di lingkungan masing-masing, mesti menjadi tanggung jawab bersama, dengan melibatkan partisipasi semua pihak.

Semua pihak yang Anda maksud ini siapa saja?

Pengaktifan Siskamling ini harus melibatkan partisipasi semua pihak, baik Pemerintah, aparat, maupun warga.

Jadi bukan diserahkan ke warga sepenuhnya?

Pemerintah harus mengajak seluruh pihak, untuk bahu membahu menghadirkan kenyamanan dan ketertiban di lingkungan.

Artinya, siskamling ini harus ada kolaborasi ya?

Iya. Pemerintah, aparat, dan warga harus kolaborasi untuk pekerjaan tersebut.

Mari terus kita hidupkan semangat bahu membahu dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik, dan itu bisa dimulai dari lingkungan sekitar. ■ NNM

MARDANI ALI SERA

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS

Harusnya Ini Menjadi
Gerakan, Bukan Paksaan



Saya lebih mengusulkan ada forum warga, di mana budaya kewargaan, gotong royong, kolaborasi, guyub bisa dibuat.

Bagaimana pandangan Anda mengenai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengeluarkan edaran kepada RT dan RW agar pelaksanaan Siskamling ditingkatkan?

Bisa. Tetapi sebaiknya, ini betul-betul menjadi gerakan yang datang dari masyarakat. Saya lebih mengusulkan ada forum warga, di mana budaya kewargaan, gotong royong, kolaborasi, guyub bisa dibuat. Kalau Siskamling mau dijalankan, bisa diterapkan dengan situasi dan kondisinya.

Maksudnya bagaimana?

Di daerah perumahan perlu juga ada forum warga. Karena sering kejadian

rumah rumah mewah jadi tempat pembuatan narkoba, *call center* kriminal dan lainnya. Karena mereka para penjahat menganggap perumahan mewah tidak ada yang mengawasi. Apapun kata bang Napi, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan.

Menurut Anda, arahan dari Mendagri agar RT/RW meningkatkan Siskamling ini bisa efektif?

Pemerintah Pusat, Pemda dan masyarakat wajib berkolaborasi dalam menjaga lingkungan, dan siskamling adalah salah satunya. Kalau lainnya ini, ada forum warga dimana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan

RT, RW, lurah kalau perlu camat atau perwakilan Pemda untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan.

Masalah seperti apa?

Ya misal masalah narkoba, masalah anak muda, lingkungan, banjir dan lainnya. Itu harus masuk dalam forum warga. Seluruh sumber daya pusat dan daerah bisa di libatkan.

Terus bagaimana pengawasan terkait jalannya Siskamling jika ini arahan dari Pemerintah Pusat?

Urutan pengawasan harus dilakukan secara partisipatif dan integratif. ■ NNM